BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Pada saat ini *fee* audit masih menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya informasi atau riset-riset yang meneliti tentang apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *fee* audit. Menurut Fachriyah (2010, dalam Wibowo, 2012) ada banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit, misalnya (1) besar kecilnya klien, (2) lokasi kantor akuntan public, (3) ukuran kantor akuntan publik. Faktor-faktor tersebut hingga sekarang masih akan sangat mempengaruhi penentuan besarnya *fee audit* yang di tetapkan oleh KAP kepada kliennya.

Selain itu juga ada salah satu kasus audit umum yang dialami oleh salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT. Sinar Jaya. Kasus tersebut terjadi ketika KAP Jojon & Priyadi mendapatkan pekerjaan untuk mengaudit PT. Sinar Jaya. KAP Jojon & Priyadi menunjuk salah seorang direkturnya, yaiatu Irwan K., SE, Ak CPA sebagai penanggung jawab atas pekerjaan mengaudit PT. Sinar Jaya. KAP Jojon & Priyadi memperoleh saran dan masukan dari KAP Bambang & Basuki untuk mengaudit PT. Sinar Jaya. Oleh karena itu, KAP Bambang & Basuki mendapatkan sejumlah *fee* dari PT. Sinar Jaya & KAP jojon & Priyadi. Selain *fee* dari KAP Jojon & Priyadi, ternyata KAP Bambang & Basuki juga memperoleh *fee* dari PT. Sinar Jaya.

Fee jenis ini tidak terdapat dalam aturan etika kompartemen Akuntan Publik No. 503.

Berdasarkan kasus diatas seharusnya perlu dipertanyakan dimanakah peranan *corporate governance* dan pengendalian internal dari perusahaan tersebut yang memiliki fungsi untuk memonitoring kinerja dari manajemen perusahaan. Selain itu auditor internal juga perlu memeriksa kembali laporan keuangan dengan benar. Tetapi tidak hanya auditor internal saja auditor eksternal juga perlu memeriksa lebih lanjut laporan keuangan perusahaan agar dapat meningkatkan kepercayaan pada perusahaan terhadap hasil audit.

Dalam proses tersebut perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang disebut dengan *audit fee*. Peranan dari *corporate governance* dan auditor internal yang memiliki fungsi monitoring perlu dimaksimalkan agar laporan keuangan yang dibuat dapat menjadi lebih baik dan terhindar dari hal-hal tersebut. Tidak hanya itu saja peran *corporate governance* dan auditor internal sebagai salah satu bentuk keandalan pelaporan keuangan perusahana tentunya juga akan mempengaruhi besar kecilnya *fee* audit yang dibayarkan (Wibowo, 2012)

Fee Audit sendiri memiliki banyak artian, para ahli pun mengartikannya berbeda-beda. Misalkan saja Menurut Iskak (1999, dalam Wibowo, 2014) *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak

langsung. Menurut Agoes (2012:56), *fee audit* adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.

Standar profesional akuntan publik seksi 240 poin 1 tentang fee menyatakan, dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Sedangkan menurut Sankaraguruswamy *et al*, dalam Halim (2005) *fee audit* adalah pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa factor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien *(client size)*, ukuran KAP, keahlian auditor tentang industri *(industry expertise)*, dan efisiensi yang dimiliki oleh auditor *(technological aefficiency of auditors).* Tidak hanya itu saja masih ada hal atau faktor lain yang dapat menyebabkan *fee audit* menjadi sangat besar ataupun justru sebaliknya sangat rendah. Faktor tersebut antara lain *struktur governance*, pengendalian internal, dan ukuran dari KAP yang dipilih juga dapat mempengaruhi besarnya *fee audit.*

Salah satu faktor yang yang berhubungan dengan fee audit adalah *Struktur Governance*. Menurut Hazmi (2013*) struktur governance*, dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip governance sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Sedangkan *struktur governance* pada penelitian ini akan diproksikan dengan

menggunakan dewan komisaris, komite audit, serta menggunakan keberadaan dari komite manajemen risiko pada suatu perusahaan.

Dewan komisaris sendiri menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2016), adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance.* Apabila kinerja dari dewan komisaris ini buruk atau tidak sesuai maka tentu pengawasan yang dilakukannya akan berkurang sehingga akan menyebabkan *fee audit* yang dikeluarkan menjadi besar. Selain itu jika dewan komisaris ini juga merangkap jabatan menjadi CEO maka independensi dari dewan komisaris rendah sehingga akan menggangu fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen serta proses akuntansi keuangan sehingga auditor perlu melakukan *effort* yang lebih tinggi dan akan mempengaruhi besarnya *fee audit* yang diterima.

Menurut Surya dan Yustiavandana (2008:145), Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Menurut forum *For Corporate Governance In Indonesia* komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sama halnya dengan dewan komisaris jika komite audit dari suatu perusahaan memiliki tingkat independensi yang tinggi maka hal tersebut akan membuat tugas dari auditor eksternal menjadi lebih ringan dan dalam menjalankan tugasnya mereka tidak perlu melakukan *effort* yang lebih

sehingga akan menyebabkan biaya atau *fee audit* yang diberikan juga menjadi lebih rendah.

Selain itu dari sisi permintaan, kehadiran komite audit memiliki hubungan yang positif dengan *fee audit* karena komite audit memastikan bahwa lama proses audit tidak akan dikurangi sampai pada tingkat kualitas audit yang diinginkan. Dari sisi penawaran, keterlibatan komite audit dalam memperkuat pengendalian internal yang menuntun auditor eksternal mengurangi penilaian dari risiko pengendalian, menghasilkan uji substantif yang lebih sedikit, dan *fee* audit yang lebih rendah (Cadburry Committee, 1992 dalam Goodwin, Stewart dan Kent, 2006:6).

Jika dilihat dari ukuran KAP yang melakukan kegiatan auditing maka terdapat 2 KAP yaitu KAP yang masuk dalam kategori *Big 4* dan KAP yang tidak termasuk dalam kategori *Big 4* atau *non Big 4*. Menurut Nindita (2010) ada 4 kategori ukuran KAP, yaitu: KAP Internasional Ada 4 KAP terbesar di Amerika Serikat yang disebut KAP Internasional dengan julukan *The Big Four*. Masing-masing KAP tersebut memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan kota-kota besar lainnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. *Big Four* di Indonesia diwakili kepentingannya oleh KAP di Indonesia, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perwakilan KAP *Big 4* di Indonesia

PricewaterhouseCoopers	KAP Haryanto Sahari & Rekan
Deloitte Touche Tohmatsu	KAP Osman Bing Satrio
Ernst & Young	KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja
KPMG	KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja

Sumber data: diolah 2017

KAP Nasional beberapa KAP lainnya di Amerika Serikat dianggap sebagai KAP berukuran nasional karena memiliki cabang di seluruh kota besar Amerika Serikat. KAP ini memberikan pelayanan yang sama dengan KAP *Big Four*. KAP Lokal dan Regional Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP lokal atau regional, dan terutama terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan yang lain memiliki beberapa buah kantor cabang di daerah lain. KAP Lokal Kecil adalah KAP yang memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional. Sebagian besar KAP di Indonesia tergolong ke dalam jenis KAP ini. Semakin besar ukuran KAP yang dipekerjakan makan hasil audit yang di keluarkan juga akan lebih berkualitas sehingga akan menyebabkan *fee audit* yang diberikan menjadi lebih besar atau lebih tinggi.

Faktor terakhir yang masih dapat mempengaruhi besar kecilnya *fee* yang diterima oleh auditor adalah tentang bagaimana pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Pengendalian internal sangat

penting bagi perusahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian internal sendiri merupakan penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Saran pengendalian ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, bentuk organisasi, kebijakan, sistem prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, laporan, catatan, daftar auditing, metode, rencana, dan auditing internal. Simunic (2006) menyatakan bahwa beberapa pekerjaan audit eksternal dapat dikurangi bila fungsi pengendalian internal berjalan dengan baik. Jika pengendalian internal berjalan dengan baik maka hal tersebut akan mengurangi pekerjaan dari audit eksternal sehingga *fee* yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk auditor menjadi lebih rendah.

Penelitian kali ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian Chandra (2015) dengan mengganti variable karakteristik perusahaan dengan ukuran KAP. Serta menambahkan satu variabel yaitu komite audit. Alasan penambahan variabel tersebut dikarenakan terdapat *research gap* pada penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, Rambe, dan Fatahurrazak (2016) yang menyatakan bahwa independensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *fee audit* eksternal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) menyatakan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh terhadap penentuan *fee audit* eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini ingin menguji variabel mana sajakah

yang akan memberikan pengaruh terhadap penentuan *fee audit* dan juga untuk menguji kembali variabel independensi komite audit yang masih terjadi *research gap.* Penelitian ini diujikan kepada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2013-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris suatu perusahaan dapat mempengaruhi penentuan besarnya *fee audit*?
2. Apakah komite audit dalam perusahaan dapat berpengaruh dalam penentuan *fee audit*?
3. Apakah keberadaan dari komite manajemen risiko dapat mempengaruhi penentuan *fee audit*?
4. Apakah ukuran dari KAP yang ditunjuk oleh perusahaan dapat memberikan dampak terhadap penentuan besarnya *fee* yang di terima oleh auditor?
5. Apakah keberadaan dari unit pengendalian internal perusahaan mempengaruhi terhadap penentuan *fee audit*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan dan rumusan masalah yang telah diungkapkan maka tujuan dari penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari dewan komisaris suatu perusahaan terhadap besaran *fee audit* dari auditor eksternal.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit perusahaan dalam penentuan *fee audit.*
3. Untuk mengetahui pengaruh dari keberadaan komite manajemen risiko terhadap penentuan besarnya *fee audit.*
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dari KAP yang ditunjuk oleh perusahaan terhadap penentuan besarnya *fee* yang di terima oleh auditor eksternal.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal perusahaan terhadap besarnya *fee audit*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat yaitu:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan kepada masyarakat serta sebagai referensi atau rujukan yang akan untuk melakukan penelitian yang memiliki topik serupa.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan info-info tambahan kepada

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengenai factor-faktor apa saja yang kiranya dapat mempengaruhi

1.5 Sistematika penulisan

Skripsi atau penelitian kali ini dibuat dan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari penjelasan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang digunakan pada penelitian, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, indentifikasi, definisi, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan, dan saran terhapad penelitian yang akan datang.